SOAL USBN PKN 2019/2020

1. Penyelenggaraan negara akan berjalan dengan baik jika penyelenggara negara  mampu menjalankan fungsinya dengan penuh tanggung jawab, dilaksanakan secara efektif, efisien serta dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila. Hal tersebut menunjukkan pentingnya nilai-nilai Pancasila menjadi landasan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara dengan menjadi ....

A. hukum dasar dalam praktik penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan

B. landasan filosofis dalam menjalankan kehidupan pemerintahan negara

C. landasan filosofis bagi penguasa dalam mempertahankan kekuasaannya

D. norma hukum yang mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan negara

E. landasan filosofis dalam melakukan amandemen terhadap konstitusi Negara

1. Sifat dari UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 adalah luwes dan fleksibel terutama batang tubuh yang sudah diamandemen. Dasar hukum amandemen UUD kita adalah…..
2. Pasal 27 UUD 1945
3. Pasal 28 UUD 1945
4. Pasal 33 UUD 1945
5. Pasal 35 UUD 1945
6. Pasal 37 UUD 1945
7. Menurut Pasal 1 ayat 2 UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 sebelum diamandemen “ Kedaulatan berada di tangan rakyat dan sepenuhnya dilakukan…..”.
8. Oleh MPR
9. Menurut UUD
10. Oleh Presiden
11. Oleh DPR
12. Oleh MA
13. Penegakan hak asasi manusia masih jauh dari harapan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh ?
14. Maraknya aksi demokrasi
15. Ketegasan para penegak hukum
16. Belum adanya undang-undang yang mengatur secara tegas
17. Tingginya tingkat kesadaran masyarakat
18. Masih adanya prilaku tidak adil dan diskriminatif
19. Suatu perasaan rakyat masyarakat, serta bangsa terhadap kondisi bangsa Indonesia dalam perjalanan hidupnya menuju cita-cita bangsa, yaitu masyarakat adil dan makmur berdasarkan pancasila dan UUD 1945 merupakan inplementasi dari. . .
20. Paham kebangsaan
21. Aliran kebangsaan
22. Sifat Negara
23. Paham kerakyatan
24. Rasa kebangsaan
25. Pasal-pasal dalam UUD 1945 yang mengatur hak dan sekaligus kewajiban warga negara Indonesia adalah pasal . . . . .
26. 27 ayat (1) dan 30 ayat (1)
27. 27 ayat (1) dan 30 ayat (2)
28. 27 ayat (2) dan 30 ayat (1)
29. 27 ayat (2) dan 30 ayat (2)
30. 27 ayat (1) dan (2), 30 ayat (1) dan (2)
31. Hukum yang mengatur hubungan hokum antara warga Negara satu Negara dengan warga Negara Negara lain dalam satu hubungan internasional, dinamakan………..
32. Hukum perdata internasional
33. Hukum internasional umum
34. Hukum internasional khusus
35. Hukum public internasional
36. Hukum I nternasional regional
37. Hukum nasional merupakan hasil pengklasifikasian hukum berdasar …
38. Bentuknya
39. Funginya
40. Sumbernya
41. Tempat berlakunya
42. Luas berlakunya
43. Pengakuan dari Negara lain sangat diperlukan oleh suatu Negara yang merdeka dan berdaulat untuk. . .
44. Mempertahankan jati diri dan adat istiadat masyarakat
45. Keamanan dan pertahanan Negara
46. Membangun citra yang baik terhadap Negara tetangga
47. Mematuhi keinginan perserikatan bangsa-bangsa ( PBB )
48. Syarat sahnya suatu Negara
49. Keikut sertaan bangsa Indonesia dalam upaya ikut melaksanakan ketertiban dunia seperti yang tertuang dalam Pembukaan UUD NKRI adalah dengan cara …
    1. Menjadi anggota PBB
    2. Bekerja sama dengan Negara tetangga
    3. Ikut serta dalam pengiriman pasukan perdamaian ke daerah konplik
    4. Memberikan dukungan Negara yang ingin merdeka
    5. Melakukan lobi politik dengan negara adidaya
50. Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam usaha pembelaan negara, hak dan kewajiban untuk membela negara termuat di dalam pasal …
    1. 28 A UUD 1945
    2. 29 UUD 1945
    3. 30 UUD 1945
    4. 31 UUD 1945
    5. 32 UUD 1945
51. Bangsa Indonesia mengakui persamaan harkat dan martabat manusia. Hal ini selaras dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya………….  
    A. Pertama   
    B. Kedua   
    C. Ketiga   
    D. Keempat   
    E. kelima
52. Dasar hukum yang diharapkan dapat melindungi hak asasi manusia terhadap pelanggan HAM berat adalah ?
53. Undang-undang nomor 25 tahun 2000
54. Undang-undang nomor 26 tahun 2000
55. Undang-undang nomor 23 tahun 2001
56. Undang-undang nomor 24 tahun 1999
57. Undang-undang nomor 22 tahun 1999
58. Manakah di bawah ini yang merupakan faktor penghambat supremasi hukum dalam penegakkan HAM di Indonesia ?
59. Belum adanya undang-undang Nasional yang mengatur tentang HAM.
60. Belum tersedianya Instrumen HAM dalam ketetapan MPR RI.
61. Belum adanya departemen dalam satu kabinet yang mengurusi secara Khusus tentang HAM.
62. Belum terbentuknya hukum yang menghormati HAM, baik oleh para pejabat, paraktisi hukum, maupun masyarakat.
63. Adanya kekosongan jabatan jaksa angung.
64. Proses penegakan hukum dilakukan dalam rangka pelaksanaan norma hukum sebagai acuan perilaku bagi seluruh warga negara tanpa kecuali dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan demikian pentingnya persamaan di dalam hukum bagi warga negara Indonesia adalah ....
65. terciptanya keadilan, ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat
66. menjamin terciptanya keadilan hukum bagi para penguasa pemerintahan
67. meminimalisir pertentangan yang terjadi antarindividu dalam masyarakat
68. membantu aparat penegak hukum dalam menciptakan ketertiban nasional
69. melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
70. Pengertian semangat kebangsaan atau Nasionalisme merupakan perpaduan dari dua aspek yaitu. . .
71. Rasa kebangsaan dan nilai kemanusiaan
72. Rasa kebangsaan dan paham kebangsaan
73. Paham kebangsaan dan rasa kesetiakawanan sosial
74. Rasa kemanusiaan dan paham kerakyatan
75. Rasa cinta tanah air dan rasa memiliki
76. Dengan masuknya berbagai pengaruh dari negara lain yang dikhawatirkan dapat membahayakan budaya bangsa, maka sikap yang harus kita lakukan yaitu …..
77. Menutup arus informasi dan komunikasi.
78. Melarang keluarga bepergian ke luar negeri.
79. Menerimanya dengan penuh selektif.
80. Melarang pembelian produk luar negeri.
81. Melarang orang asing masuk ke Indonesia.
82. Prinsip-prinsip dasar kehidupan demokrasi adalah penting untuk mewujudkan kehidupan bernegara yang konstitusional. Berikut ini yang merupakan prinsip-prinsip dasar kehidupan demokrasi yaitu …..
83. Pemerintahan berdasarkan kekuasaan absolut.
84. Peranan media massa yang terbatas.
85. Sistem peradilan yang berpihak pada kekuasaan.
86. Adanya penyelenggaraan pemilu yang demokratis.
87. Kurangnya pendidikan demokrasi di sekolah.
88. Perkembangan dan kemajuan IPTEK sangat mendukung upaya ketergantungan di berbagai aspek kehidupan global. Namun ada dampak negatif yang harus diwaspadai yaitu …..
89. Saling bekerja sama.
90. Dapat memanfaatkan waktu
91. Hidup teratur.
92. Berdisiplin.
93. Bersikap individualis.
94. Sistem pemerintahan dimana menteri-menteri tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau parlemen tetapi kepada presiden disebut .....
95. Parlementer.
96. Presidensiil.
97. Republik.
98. Monarchi.
99. Demokrasi.
100. Kepolisian Republik Indonesia sebagai lembaga penegak hkum berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Berikut contoh peran Kepolisian dalam menjamin keadilan dan kedamaian dalam masyarakat yaitu ….

A. memberi usulan atas pengangkatan pejabat kepolisian kepada DPR

B. melakukan penindakan terhadap ormas yang mengkritisi pemerintah

C. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan para hakim

D. memutuskan perselisihan mengenai sengketa hasil pemilihan umum

E. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan

1. Hubungan internasional merupakan hubungan antarbangsa-bangsa di dunia yang bersifat dinamis dalam rangka menciptakan proses kerjasama internasional yang saling menguntungkan sehingga berdampak pada pencapaian tujuan nasional. Alasan yang melatar belakangi pemerintah Indonesia menerapkan politik luar negeri yang bebas dan aktif dalam tata hubungan tersebut adalah ....

A. mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keutuhan negara Indonesia

B. bangsa Indonesia ingin melindungi segenap dan seluruh tumpah darah Indonesia

C. memperoleh barang dari luar negeri untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya

D. netralitas bangsa Indonesia dan keinginan berperan aktif dalam perdamaian dunia

E. bangsa Indonesia ingin menjadi bangsa yang besar dan disegani bangsa lain di dunia

1. Perlindungan dan penegakan hukum merupakan upaya yang dilakukan dalam rangka pengamanan, pengawasan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi manusia. Perlindungan dan penegakan hukum tersebut sangat penting agar ....

A. kepastian dan ketertiban hukum dalam kehidupan di masyarakat

B. menjadikan hukum sebagai alat kekuasaan untuk para penguasa negara

C. meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum

D. terciptanya persamaan dimata hukum antarwarga masyarakat yang homogen

E. terwujudnya kerjasama yang baik antara masyarakat dengan aparat penegak hukum

1. Setelah mengalami perubahan yang kedua (amandemen 2), pada masa reformasi pemerintahan yang awalnya terpusat (sentralisasi) pada masa orba berubah menjadi disentralisi. Hal ini sesuai dengan pasal …. UUD 1945
   1. 18 ayat 1
   2. 18 ayat 2
   3. 18 ayat 3
   4. 18 ayat 4
   5. 18 ayat 5
2. Gerakan reformasi menuntut terwujudnya pemerintahan yang bersih dan demokratis . pemerintahan yang bersih adalah……..
3. pemerintahan yang tidak sewenang-wenang kepada rakyat
4. pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme
5. menjamin hak-hak asasi manusia
6. melaksanakan pancasila secara murni dan konsekwen
7. melaksanakan pembangunan disegala bidang
8. Pancasila sebagai dasar negara secara yuridis formal konstitusional tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Hal ini merupakan fungsi Pancasila sebagai …..
   1. Ideologi terbuka.
   2. Sumber hukum.
   3. Alat pemersatu bangsa.
   4. Kepribadian bangsa.
   5. Cita-cita bangsa
9. Perhatikan beberapa situasi dan kondisi berikut !

(1) Timbulnya kesenjangan sosial yang tajam akibat dari adanya persaingan bebas

(2) Penggunaan pengerahan massa untuk menumbangkan suatu pemerintahan yang sah

(3) Munculnya gejala westernisasi, yaitu gaya hidup yang berorientasi kepada budaya barat

(4) Menggalang kekuatan politik untuk melemahkan kekuasaan pemerintah yang berkuasa

(5) Pola perjuangan tidak bersenjata kelompok separatis yang ditempuh untuk menarik simpati masyarakat internasional

Berdasarkan uraian beberapa kondisi diatas yang merupakan kasus ancaman terhadap negara di bidang politik ditandai oleh nomor ....

A. (1), (2) dan (3)

B. (1), (3) dan (5)

C. (2), (3) dan (4)

D. (2), (4) dan (5)

E. (3), (4) dan (5)

1. Perhatikan beberapa aspek wawasan nusantara berikut!

(1) Letak dan bentuk geografis wilayah Indonesia

(2) Keadaan dan kemampuan penduduk bangsa Indonesia

(3) Keadaan dan kekayaan alam yang dimiliki bangsa Indonesia

(4) Sistem politik yang sangat menentukan kehidupan politik negara

(5) Ideologi sebagai perekat pemersatu yang ditanamkan seluruh WN

(6) Kondisi dinamika dalam kehidupan pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia

Berdasarkan aspek wawasan nusantara di atas yang merupakan aspek alamiah wawasan nusantara ditandai oleh nomor ....

A. (1), (2) dan (3)

B. (1), (3) dan (5)

C. (2), (4) dan (6)

D. (3), (4) dan (5)

E. (4), (5) dan (6)

1. Komitmen terhadap persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia merupakan proses dinamis yang tumbuh dari unsur-unsur sosial budaya masyarakat Indonesia yang beragam yang mencerminkan kebhinnekaan bangsa Indonesia. Contoh perilaku yang mencerminkan komitmen tersebut adalah ....

A. bersikap mengutamakan kebersihan lingkungan di sekitar lingkungan tempat tinggal

B. bekerjasama dalam segala bidang kehidupan dengan sesama suku, agama, dan daerah

C. membantu korban bencana alam ketika bencana tersebut terjadi di wilayah asalnya

D. bergaul secara santun dan akrab dengan mengesampingkan perbedaan suku bangsa

E. meningkatkan solidaritas dalam kegiatan yang berorientasi semangat kedaerahan

1. Salah satu penyebab timbulnya sengketa internasional adalah segi politis, yaitu berupa…..
   1. Pengaruh ideology
   2. Batas wilayah
   3. Faktor ekonomi
   4. Lingkungan hidup
   5. Kewarganegaraan
2. Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila tidak diragukan lagi karena merupakan filsafat bangsa, dasar negara, dan ideologi negara. Hal ini merupakan kedudukan Pancasila sebagai …..
3. Paradigma pembangunan.
4. Moral pembangunan.
5. Perjanjian luhur bangsa.
6. Sumber nilai.
7. Dasar negara.
8. Sebagai Negara kepulauan yang dikelilingi wilayah perairan, maka ditentukan batas-batas wilayah perairannya. Wilayah laut Indonesia yang disebut Zona Ekonomi Eklusif atau ZEE adalah…..
   1. 3 mil
   2. 12 mil
   3. 20 mil
   4. 200 mil
   5. 2000 mil
9. Perhatikan contoh peristiwa berikut? Tiba-tiba seorang ibu menyerobot lampu merah di traffic light dan hampir saja terjadi kecelakaan. Spontan seorang polisi mengejar pengendara tersebut dan diberhentikan kemudian diminta menunjukkan surat-surat kendaraan termasuk SIM dan ditunjukkan kesalahannya. Ternyata ibu tersebut adalah istrinya sendiri. Mohon maaf saya menilang anda karena telah melakukan kesalahan dalam berlalu lintas melanggar rambu- rambu dan membahayakan keselamatan diri sendiri dan orang lain, begitu polisi itu berkata. Dan si ibu itu hanya menunjukkan muka kecewa dan sedih tetapi tidak dapat berkata-kata. Dari kutipan peristiwa tersebut di atas menunjukkan ….
10. Hukum tanpa pandang bulu.
11. Keputusan hukum yang tidak manusiawi.
12. Hukum itu bebas dan tetapi tidak mandiri.
13. Hukum itu tidak adil karena telah menindak istri sendiri.
14. Hukum adalah hukum harus mengesampingkan unsur yuridis.
15. Bangsa Indonesia adalah bangsamultikultural yang rawan terpecah belah. Dalam upaya mewujudkan negara Indonesia yang bersatu, integrasi harus dapat diwujudkan. Faktor-faktor yang dapat mendorong integrasi nasional adalah:
16. Tidak menerima perbedaan dan melihatnya sebagai bagian dari kebudayaan asing.
17. Sikap ramah dan gotong royong hanya dengan kelompoknya sendiri
18. Sikap toleransi dan empati terhadap keragaman budaya yang ada di Indonesia.
19. Perbedaan dalam unsur-unsur budaya seperti ekonomi, social, politik.
20. Mau mencari unsur-unsur budaya asing yang sama dengan kebudayaan daerahnya
21. Pengadilan yang sehari-hari memeriksa dan memutuskan perkara dalam tingkat pertama dari segala perkara perdata dan pidana untuk semua golongan penduduk  adalah…..
22. Pengadilan Tinggi
23. Pengadilan Negeri
24. Pengadilan Militer
25. Mahkaman Agung
26. Pengadilan Tata Usaha Negara
27. Proses pembukaan dan pengangkatan perwakilan diplomatik di antara kedua negara yang menjalin hubungan diplomatik melalui beberapa tahapan, salah satunya adalah….
    1. Mewakili negara pengirim di negara penerima
    2. Masing-masing pihak mengajukan permohonan persetujuan untuk menempatkan diplomat
    3. Menelaah dengan teliti setiap kejadian atau peristiwa di negara penerima
    4. Mewakili pemerintah negaranya
    5. Meningkatkan persahabatan
28. Diawal tahun 2017 Indonesia mendapat kunjungan pemimpin negara Arab Saudi yaitu Raja Salman. Kedatangan beliau tidak hanya ingin mengunjungi Indonesia tetapi ingin menjalin kerjasama di berbagai bidang terutama ekonomi. Kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dan Arab Saudi termasuk bentuk kerja sama...
29. Kerjasama Internasional
30. Kerjasama Multi Internasional
31. Kerjasama Bilateral
32. Kerjasama Multilateral
33. Kerjasma fungsional.
34. Pada dasarnya perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler di luar negeri dalam menjalankan tugasnya memiliki kekebalan diplomatik. Hal ini menunjukkan bahwa pentingnya kekebalan diplomatik bagi korps perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler diluar negeri ....
    1. Untuk menjamin pelaksanaan tugas negara yang diwakili
    2. Eksistensi dan profesionalitas kebe-radaan negara di luar negeri
    3. Perwakilan diplomatik merupakan keberadaan negara di luar negeri
    4. Menjamin keselamatan para pejabat negara di luar negeri
    5. Menunjukan negara pada dasarnya keberadaannya mutlak di luar negeri
35. Pembagian kekuasaan negara baik kekuasaan eksekutif, legislatif maupun yudikatif diatur dalam konstitusi agar tidak terjadi tumpang tindih antara pembagian tugas dan wewenangnya. Meskipun demikian, antar lembaga negara sebagai pelaksana kekuasaan memiliki hubungan kerjasama dan mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berikut ini yang merupakan contoh kerjasama antara lembaga eksekutif dengan yudikatif yaitu Presiden ....

A. mengajukan rancangan undang-undang dan dibahas menjadi undang-undang

B. memberi grasi dan rehabilitasi yang dilaksanakan pada saat-saat tertentu

C. mengangkat duta dan konsul untuk ditempatkan di negara lain

D. memberi gelar, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan

E. menerima penempatan duta dari negara lain

1. Seorang diplomat mempunyai fungsi diplomatic. Implementasi fungsi diplomatic yang benar yaitu..
   1. Pemerintah Indonesia menempatkan para diplomatnya untuk menjadi spionase di negara penerima
   2. Pemerintah Indonesia menerima laporan dari diplomat mengenai rahasia negara Inggris
   3. Para diplomat di Negara Iran diminta kembali ke Indonesia sampai keadaan Iran membaik
   4. Duta besar Indonesia untuk Mesir menerima kewarganegaraan Mesir
   5. Duta besar Indonesia atas nama pemerintah Indonesia menghadiri acara hariulang tahun Negara Kanada
2. Perwakilan diplomatic tidak dapat di Negara tempat ia diakreditasikan. Hal ini berlaku baik kasus pidana ataupun kasus perdata. Negara penerima bias mengembalikan perwakilan diplomatic sebagai bentuk kekecewaan yang diterima oleh Negara penerima. Berkenaan dengan tidak dapat dihukumnya perwakilan diplomatic tersebut karena …
   1. Pemerintah Negara pengirim dapat membantu kasusnya
   2. Diplomat mempunyai hak untuk tidak menanggapi putusan pengadilan
   3. Para diplomatic mempunyai hak imunitas
   4. Diplomatic tidak pernah melakukan kesalahan
   5. Para diplomatic mempunyai kuasa hokum yang terbaik
3. Kewenangan pemerintah daerah berdasarkan UU No. 32 Tahun 2014 adalah ..
   1. Menjalankan urusan pemerntah pusat di daerah, kecuali urusan – urusan yang dijalankan oleh kantor – kantor departemen di daerah
   2. Menjlankan urusan pemerintahan konkuren yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat
   3. Kepala daerah bertindak sebagai pemegang eksekutif pelaksana urusan
   4. Melaksanakan koordinasi antar jawatan- jawatan pemerintah pusat
   5. Urusan otonomi daerah dan pembantuan yang dilaksanakannya dan dipertanggungjawabkan oleh kepala daerah kepada DPRD
4. Dewan Perwakilan Rakyat Derah Gotong Royong merupakan salah satu susunan pemerintah daerah berdasarkan….
   1. Dikret presiden 5 Juli 1959
   2. UU No. 18 Tahun 1965
   3. UU No. 22 Tahun 1948
   4. UU No. 1 Tahun 1957
   5. Penetapan Presiden No. 6 Tahun 1959
5. Perhatiakan pernyataan berikut ini
   * + 1. Menyusun perencanaan dan tata ruang daerah
       2. Mengembangkan sumber daya produktif di daerah
       3. Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannnya
       4. Memilih pimpinan daerah
       5. Mengelola aparatur daerah

Hak pemerintah daerah ditunjukan pada nomer …

* + - * 1. 1, 2 dan 3
        2. 1, 2 dan 4
        3. 2, 3 dan 4
        4. 2, 3 dan 5
        5. 3, 4 dan 5

1. Hak pemerintah daerah selaku pengelola otonnomi daerah dapat dilihat dalam pengelolaan..
   1. Menetapkan retribusi parkir untuk kendaraan bermotor
   2. Menyediakan fasilitas kesehatan bagi masyarakat
   3. Menyelenggarakan pelatihan menjahit untuk ibu rumah tangga
   4. Membuat susunan tata ruang darah
   5. Melestarikan kesenia daerah
2. MPR berdasarkan UUD 1945 sebelum diamandemen memiliki kedudukan …
   1. Sejajajr dengan lembaga tinggi Negara lainnya
   2. Di atas lembaga tinggi Negara lainnya
   3. Di bawah lembaga tinggi Negara lainnya
   4. Di tengah-tengah lembaga tinggi Negara lainnya
   5. Di atas UUD 1945 karena dapat mengamandemen UUD 1945
3. Lembaga Negara yang mempunyai fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan adalah lembaga …
   1. Presiden
   2. BPK
   3. DPD
   4. MPR
   5. DPR
4. Dalam perundingan Komisi Meja Bundar Belanda mengakui Indonesia sebagai Republik Indonesia Serikat. Atas kesepakatn itu pada tanggal 27 Desember 1949 bentuk Negara Republik Indonesia Serikat memberlakukan konstitusi …
   1. UUD 1945
   2. Konstitusi RIS
   3. UUDS 1950
   4. UUD 1945 yang telah diamandemen
   5. UU Negara Federal
5. Pada bbulan Fenruari 2015 perintah Indonesia mengeksekusi 2 warga Negara Autralia. Sebelum 2 warga Negara asing tersebut dieksekusi, pemerintah Australia mengancam akan memboikot pariwisata Indonesia termasuk Bali. Terhadap sikap pemerintah Australia pemerintah Indonesia seharusnya …
   1. Tidak perlu khawatir terhadap ancaman tersebut
   2. Meminta maaf kepada pemerintah Australia
   3. Membalas ancaman terhadap pemerintah Australia
   4. Menghentikan hubungan kerjasama
   5. Menarik duta besar
6. Pada tahun 1822 hingga tahun 1889 Brasil memiliki dua puluh enam Negara bagian dan satu distrik. Berdasarkan keterangan tersebut, Brasil termasuk dalam bentuk Negara …
   1. Uni
   2. Koloni
   3. Federasi
   4. Mandate
   5. Kesatuan

**KUNCI JAWABAN**

A 11. B 21. B 31. D 41. C

E 12. D 22. E 32. D 42. C

A 13. C 23. D 33 A 43. E

E 14. D 24. A 34. C 44. D

E 15. A 25. A 35. B 45. A

A 16. E 26. D 36. B 46. B

A 17. C 27. B 37. C 47. E

D 18. D 28. D 38. B 48. B

B 19. B 29. A 39. A 49. A

C 20. B 30. A 40. E 50. C